

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sudah diketahui bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kelangkaan minyak. Hampir setiap negara saat ini mengalami isu dan krisis energi tersebut, sehingga minyak adalah komoditas yang sering kali diperebutkan. Kelangkaan minyak ini juga mengarah pada kestabilan politik internasional dalam hal mempertahankan pasokan minyak ke tiap negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak. Karena dengan minyak, setiap negara dapat menggerakkan kepentingan nasionalnya seperti menjalankan roda perekonomiannya. Tidak hanya perekonomian, namun juga dalam bidang militer yang nantinya akan menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Keamanan ini penting, mengingat segala sumber daya yang dimiliki negara adalah aset yang berharga yang harus dilindungi dari intervensi negara lain.

Berkembangnya perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran minyak. Indonesia yang dulu pernah sempat kaya dan makmur akan minyak, menjadikan komoditas ini sebagai barang untuk meningkatkan pemasukan uang negara. Sehingga Indonesia menjadi negara pengekspor minyak bumi. Dengan dibentuknya OPEC, Indonesia bergabung menjadi negara anggota di tahun 1962. Karena dengan bergabungnya Indonesia ke dalam OPEC, berarti Indonesia memiliki kepentingan nasional di dalamnya. Dalam ranah internasional, Indonesia pada waktu itu juga tengah

menunjukkan politik luar negerinya yang salah satunya adalah masuk ke dalam keanggotaan organisasi-organisasi internasional.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini sebagai acuan negara Indonesia untuk tidak berpihak pada blok mana pun. Di era Presiden Soeharto, Indonesia memang tengah gencar-gencarnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dengan status Indonesia sebagai salah satu negara kaya minyak, maka tidak mengherankan apabila energi minyak ini sebagai salah satu penghasil devisa negara. Keadaan pada era Susilo Bambang Yudhoyono telah berubah. Indonesia terus mengalami penurunan akan produksi minyak sekaligus cadangan minyak yang tersedia.

Kebijakan luar negeri Indonesia ketika itu adalah keluar dari keanggotaan OPEC. Pertimbangan ini didasarkan pada untung-ruginya Indonesia jika harus bertahan di dalam organisasi tersebut, sekaligus Indonesia juga sebagai negara yang darurat akan keamanan energi. Apabila Indonesia tetap bersikeras untuk bertahan, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengekspor minyak sejumlah kuota yang ditentukan OPEC. Sedangkan Indonesia sendiri telah mengalami penurunan produksi dan cadangan minyak. Jumlah impor minyak Indonesia di bawah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai eksportnya. Hal inilah yang mengubah status Indonesia menjadi negara *net oil importer*. Di sisi lain juga, Indonesia harus membayar iuran anggota tahunan 2-3 juta dolar Amerika Serikat. Padahal di tahun 2008,

perekonomian internasional juga tengah mengalami krisis, sehingga iuran tersebut dinilai sangat memberatkan bagi Indonesia.

Kemudian, kebijakan luar negeri Indonesia yang lain yaitu seperti masuk ke dalam keikutsertaan dalam forum energi internasional. Salah satu forum energi internasional tersebut yakni IEA (*International Energy Agency*) Hal ini juga didasarkan definisi konsep keamanan energi itu sendiri, yang mana bagaimana negara dapat tetap terus memasok kebutuhan energinya secara berkelanjutan. Bersama forum ini, Indonesia dan IEA banyak melakukan kerjasama dalam bidang energi, termasuk minyak bumi. Salah satunya adalah tanggap darurat krisis minyak. Sistem ini memiliki mekanisme dalam mengatasi kelangkaan minyak bagi negara yang sedang membutuhkan pasokan minyak. Dengan sistem tersebut, kelangkaan minyak dapat teratasi.

Kerjasama yang dilaksanakan antara Indonesia dan IEA ini berada di bawah Kementerian ESDM. Untuk terwujudnya pengelolaan energi yang baik dan berkelanjutan maka dibentuklah DEN (Dewan Energi Nasional), sebuah badan independen yang mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan energi. Pengelolaan energi oleh DEN ini lebih banyak mengadopsi cara-cara pengelolaan energi pada IEA. Indonesia saat ini tidak lagi memandang energi fosil seperti minyak bumi adalah energi pokok, namun perlu adanya energi baru terbarukan yang dapat menggantikan peran energi fosil dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi.

Tidak dipungkiri juga bahwa, semakin bertambahnya usia Indonesia, maka semakin bertambahnya populasi penduduk di negeri ini. Meningkatnya populasi penduduk Indonesia berarti meningkatnya kebutuhan konsumsi. Konsumsi tersebut salah satunya berimbas pada konsumsi minyak bumi. Karena konsumsi minyak bumi ini juga dilakukan di banyak sektor, seperti industri, transportasi, listrik dan lain sebagainya. Bahkan prediksi ke depan menunjukkan bahwa kebutuhan akan konsumsi energi terus mengalami peningkatan. Padahal jumlah cadangan energi fosil yang berupa minyak bumi semakin menipis.

Meninjau kebijakan luar negeri Indonesia yang dilaksanakan di era Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjamin keamanan energi minyak bumi di Indonesia sudah dinilai tepat. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan OPEC adalah karena Indonesia yang sudah tidak relevan lagi disebut sebagai negara pengekspor minyak karena impor minyak Indonesia sendiri justru jauh lebih besar. Selain itu, di sinilah kesempatan Indonesia untuk menyimpan cadangan energi minyak buminya untuk masa mendatang karena sudah tidak terikat lagi dengan regulasi OPEC untuk ekspor. Sekaligus kebijakan ini menyadarkan pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa Indonesia bukan lagi negeri yang makmur akan minyak.

Kemudian dibentuknya DEN dan bekerjasama dengan IEA juga sebagai kebijakan luar negeri yang dapat menunjang terjaminnya keamanan minyak bumi. Apabila kita melihat rancangan-rancangan dan program-program yang diberlakukan oleh DEN maupun IEA adalah program yang

cenderung mengelola energi secara efisien dan efektif. Artinya kedua badan tersebut lebih cenderung untuk menggunakan energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan ini dapat digunakan sebagai alternatif dari bahan bakar yang berbasis fosil. Selain itu, walaupun Indonesia bukanlah negara anggota IEA secara penuh, namun Indonesia telah bekerjasama dengan IEA. Kerjasama ini juga menjadi alternatif Indonesia untuk mendapatkan pasokan minyak dengan sistem tanggap darurat krisis minyak IEA.

B. Kritik dan Saran

Pandangan Indonesia yang belum visioner dalam melihat energi fosil secara keseluruhan, khususnya energi minyak bumi, membuat Indonesia terlena akan potensi sumber daya alam tersebut. Sedangkan kita mengetahui bahwa sumber daya alam yang berbasis pada fosil adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dampaknya pada Indonesia saat ini adalah negara ini mengalami krisis keamanan energi. Berbicara mengenai keamanan, apabila terjadi krisis maka negara Indonesia sangat rentan dengan ancaman kelangkaan pasokan minyak.

Langkanya pasokan minyak akan berdampak pada berbagai sektor di berbagai bidang. Penulis melihat pada status quo saat ini dan yang sudah terjadi. Naiknya harga BBM saja sudah membuat masyarakat seluruh negeri berunjuk rasa, menuntut agar harga BBM segera diturunkan dan diberikan subsidi bagi warga yang kurang mampu. Akan tetapi subsidi yang diberikan justru dinikmati pada golongan yang memiliki kendaraan pribadi, rakyat

kurang mampu hanya menikmati sebagian. Salah penggunaan dan pengelolaan energi inilah yang memicu pemborosan dalam penggunaan energi minyak bumi.

Melihat dari segi ekspor dan impor minyak bumi. Jika Indonesia dulu pernah sanggup menjadi negara eksportir minyak, sudah seharusnya Indonesia juga mempersiapkan dan memprediksi kalau cadangan tersebut akan menipis. Akibatnya sekarang negara kita adalah negara pengimpor minyak. Walaupun demikian, Indonesia sudah semestinya melakukan pembaruan dalam pengelolaan energi. Salah satunya adalah menggunakan energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat menjadi alat untuk mengkoordinasikan penggunaan energi yang ramah lingkungan dan hemat dalam penggunaannya.